

## Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai

Tria Maulia, Sylviana Wulandari Rambe, Ester Luvita, Rika Silvia Harahap, Very Hotman Sijabat, Nur Ainun

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Koresponden Author: triamaulaa@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam membantu, memberdayakan ataupun meningkatkan kesejahteraan nelayan yang ada di Desa Sialang Buah terbilang belum optimal dirasakan oleh para nelayan. Hal ini disebabkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Salah satu yang menjadi keluhan nelayan adalah naiknya harga BBM sebagai bahan bakar mesin sampan mereka. Dalam upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, pemerintah seharusnya dapat mengambil sikap dengan membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam hal meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kesejahteraan, Nelayan, Sialang Buah

**Abstract:** This study aims to determine the role of local government in the welfare of fishing communities in Sialang Buah Village, Serdang Bedagai Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to the type of case study research. Qualitative descriptive research method is research that is used to describe events or phenomena that occur. Collecting data in this study using observation techniques, interviews and documentation. The results of this study indicate that the role of the local government in helping, empowering or improving the welfare of fishermen in Sialang Buah Village has not been optimally felt by fishermen. This is due to the lack of attention from the local government related to various problems faced by fishermen. One of the complaints of fishermen is the rising price of fuel to fuel their canoe engines. In efforts to improve the welfare of fishing communities, the government must be able to take a stand by making policies to empower coastal communities in terms of improving the welfare of fishermen.

**Keywords:** Government Role, Welfare, Fisherman, Sialang Buah

### PENDAHULUAN

Salah satu negara yang memiliki wilayah maritim dan kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63% sama dengan tiga perempat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Abidin As, 2019). Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Dari gambaran tersebut menunjukkan potensi kekayaan negara Indonesia pada sektor perikanan dan kelautan (Taufik, 2013). Hal ini membuat Indonesia sangat berpotensi dalam mengembangkan sumber daya

dalam hal perikanan. Namun kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya pada bidang perikanan yang melimpah masih kurang, sehingga menyebabkan sangat lambatnya recovery perekonomian nasional. Menurut para pakar ekonomi sumber daya, kemiskinan nelayan disebabkan oleh beberapa faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan karakteristik sumber daya serta terkonologi yang digunakan. Sehingga membuat nelayan masih tetap dalam kemiskinan (Arifandy et al., 2020).

Tujuan sebuah Negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal 1 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Damima, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di wilayah pesisir sebanyak 7,87 juta jiwa atau sebesar 25,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta jiwa. Hal ini berarti angka kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir merupakan yang paling tinggi. Hal ini tentunya diperlukan adanya tindakan untuk dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Peran pemerintah dalam membantu mensejahterakan masyarakat nelayan pada sektor perikanan sangatlah penting, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan yakni mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya membantu masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonominya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah (Ramdayanti et al., 2021). Tugas pembantuan kepada masyarakat sebenarnya merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Kambo, 2015).

Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata pencahariannya sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan (Wijayanti & Ihsannudin, 2013). Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan informasi teknologi penangkapan (Takariani, 2015), kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, selain itu juga sistem hasil pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumberdaya laut yang besar di Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi penghasil sumber daya laut terutama dalam sektor perikanan adalah di wilayah Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu. Wilayah yang berbatasan langsung dengan bibir pantai membuat sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan sering dihadapkan dengan persoalan dalam hal kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan, serta sarana prasarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan berdampak langsung kepada keluarga nelayan yang sangat

menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Isteri/suami dan anak dari nelayan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budidaya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya (Anwar et al., 2019).

Secara faktual kawasan pesisir di kawasan pantai Sialang Buah didominasi oleh nelayan dengan klasifikasi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan dengan pemilik kapal dengan sarana penangkapan yang cukup memadai dan akses penangkapan yang jauh. Hal ini sangat mempengaruhi hasil tangkapan dan secara langsung turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, di sisi lain beberapa nelayan memiliki sarana alat tangkap yang masih terbatas sehingga perlu adanya pembaharuan. Selain itu jumlah masyarakat nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program-program pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan.

Fenomena lain yang dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program kepada masyarakat nelayan dan seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Melalui sosialisasi yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan informasi bagi nelayan yang berdampak pada peningkatan produktifitas hasil perikanan dan kelautan. Hal demikian seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam mencari solusi pemecahan masalah bagi masyarakat nelayan (Rumarey Wattimena et al., 2022). Berdasarkan fenomena diatas oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi dalam penelitian bertempat di Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik “*probability sampling*” yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendetail dari objek yang diteliti. Kemudian observasi yang dimaksud peneliti yaitu berupa pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penggunaan teknik observasi ini di maksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui tehknik wawancara. Selain itu data yang diperoleh juga didapat dari studi kepustakaan yaitu penelusuran sumber pustaka, dokumen-dokumen, penelitian yang relevan yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek / rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Artinya sumber data yang diolah berasal dari rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara. Tumpuan teknik analisis ini terletak pada penyebab, penjelasan dan hal yang melatarbelakangi topik yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik tetapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan perdesaan. Hal menarik bahwa bagi masyarakat pesisir, hidup di dekat pantai merupakan keadaan yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya yang lebih terjamin, mengingat sebagian besar

masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat di sekitarnya, misalnya penangkapan ikan, pengumpulan dan budidaya rumput laut, dan pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya periaran atau perikanan lainnya (Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, 2017). Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM).

Dari hasil penelitian dan juga observasi yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwasanya sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah Desa Sialang Buah bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana hal ini berarti masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan pergi melaut. Umumnya masyarakat Desa Sialang buah tinggal di daerah perkampungan, dengan rata-rata tingkat ekonomi warganya adalah menengah ke bawah, banyak diantara masyarakatnya yang hanya tinggal di daerah gang-gang kecil serta berada di bibir aliran laut ke wilayah desa, yang mana dekat dengan pohon-pohon mangrove yang ada di daerah tersebut. Para istri-istri dari nelayan di desa ini juga membantu perekonomian keluarga dengan berdagang di depan rumah mereka masing-masing, seperti menjual kerang ataupun kerajinan tangan yang terbuat dari limbah kulit kerang. Gambaran umum tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di wilayah ini dapat dikatakan belum baik. Hal ini didukung dari kurangnya optimalisasi dari pemerintah dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya terkhusus dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Dalam kehidupan setiap manusia memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Begitu juga pemerintah dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan (Suwandi & Prihatin, 2020).

Peran pemerintah daerah dalam membantu, memberdayakan ataupun meningkatkan kesejahteraan nelayan yang ada di Desa Sialang Buah terbilang belum optimal dirasakan oleh para nelayan. Hal ini disebabkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Beberapa bantuan yang dapat dirasakan oleh para nelayan dari pemerintah adalah dibuatnya TPI (Tempat Pelelangan Ikan), memberikan beberapa bantuan berupa jaring, drum tempat ikan, tali, serta beberapa alat untuk menangkap ikan lainnya. Namun, yang masih dirasakan oleh masyarakat sampai sekarang hanyalah tempat pelelangan ikan yang menjadi tempat terjadinya jual beli ikan antara nelayan dan juga pembeli. TPI ini menjadi pusat dari perdagangan ikan yang ada di Desa Sialang Buah. Dengan tersedianya TPI, tentunya dapat memudahkan para nelayan untuk memasarkan ikan mereka secara langsung ke konsumen tanpa adanya perantara. Kemudian untuk pemberian bantuan, atau pemberian fasilitas yang dapat mendukung nelayan dalam bekerja belum optimal dan efektif secara kontinu diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemberian bantuan tersebut hanya dapat dirasakan oleh beberapa nelayan saja, dan hanya terjadi beberapa kali. Dalam hal ini pemerintah daerah haruslah melakukan peninjauan tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh nelayan dan membantu mereka seperti memberi kelengkapan fasilitas untuk melaut ataupun bantuan berupa pemberian bahan bakar gratis untuk mesin sampan yang sekarang harganya sudah sangat melonjak naik. Dari wawancara yang kami lakukan, hal ini juga yang menjadi keluhan masyarakat setempat atas kenaikan harga BBM. Jika dilihat dari peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan dan membantu kesejahteraan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

### 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yang dimaksud dalam penulisan ini adalah setiap usaha dan upaya pemerintah daerah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembuatan regulasi tersebut, diharapkan agar setiap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di Desa Sialang Buah akan mampu meningkatkan status ekonomi, kesehatan dan pendidikan terhadap masyarakat. Hingga saat ini pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan terkait kepada upaya-upaya yang konsisten dapat dilakukan untuk membantu mensejahterakan nelayan di daerah tersebut. Pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan solusi atau jalan keluar terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan. Pemerintah daerah harus dapat mengambil sikap dan sigap dalam membantu nelayan, seperti permasalahan susahny mendapatkan bahan bakar untuk mesin sampan, terutama semenjak naiknya harga BBM.

### 2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan nelayan, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat. Adapun peran pemerintah daerah setempat dapat berbentuk program penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup masih belum optimal dilakukan. Dari hasil wawancara kami, diketahui bahwasanya pemerintah daerah masih jarang melakukan penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat di daerah tersebut, terutama semenjak wabah Covid-19 menyerang.

### 3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan. Dalam hal ini pemerintah daerah setempat dala membantu memfasilitasi masyarakat nelayan di Desa Sialang Buah telah dilakukan dengan berbagai bentuk upaya seperti membuat TPI (Tempat Pelelangan Ikan), memberikan beberapa bantuan berupa jaring, drum tempat ikan, tali, serta beberapa alat untuk menangkap ikan lainnya. Alat tangkap adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya, alat tangkap ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu, kait, benang pancing, pemberat, batang pancing, roda pancing, umpan, indikator gigitan, tombak, jaring ikan, jebakan ikan. Pemberian alat tangkap dan boat sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan, karena alat pancing sendiri merupakan hal pokok yang utama yang dibutuhkan para nelayan setelah boat. Alat tangkap juga sangat diperlukan untuk meningkatkan keuntungan para nelayan, dan alat tangkap yang di berikan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para nelayan tersebut sehingga hasil yang didapatkannya juga menjadi maksimal, walaupun dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan tersebut belum kontinu dilakukan dan tidak merata diberikan kepada semua masyarakat. Pemberian fasilitas tersebut hanya pernah diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat nelayan saja.

#### 4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan. Untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan perlu ditopang oleh berbagai hal diantaranya keamanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah, harus melaksanakan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah memberikan persediaan sarana dan prasarana, dan juga persediaan modal untuk proses pembangunan. Pemerintah Desa Sialang Buah sudah memberikan bantuan sarana dan prasarana, walaupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat belum optimal. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, yang dimana nelayan sebagian besar ekonominya masih rendah.

Kebijakan pembangunan masyarakat pesisir pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan masyarakat itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya, aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan (Ulfa, 2018). Dalam upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, pemerintah dapat mengambil sikap dengan membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable*” yang lebih menekankan pada pemberdayaan manusia dengan mengendalikannya kehidupan mereka dan sumber dayanya, menciptakan sumber kehidupan rumah tangganya, dan secara langsung mereka dapat mengejar pembangunan sebagai suatu upaya kesejahteraan (Qodriyatun, 2013).

Adapun program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sepertihalnya pengembangan sumberdaya manusia (Windasai et al., 2021). Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pada sektor perikanan merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan pembangunan dalam perikanan. Pengembangan sumberdaya manusia dalam sektor perikanan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, dimana pengembangan sumberdaya manusia tersebut berupa pemberian pembinaan dan pelatihan. Sejauh ini peran pemerintah telah berupaya dalam melakukan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pelatihan dan pembinaan, namun untuk nelayan yang ada di Desa Sialang Buah sendiri pemerintah tidak dapat mengoptimalkan program tersebut dimana menurut hasil dalam wawancara mengatakan untuk pembinaan dan pelatihan dari pemerintah untuk daerah ini belum ada pemberian pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat nelayan. Selain hal itu, pemerintah juga dapat melakukan pengembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dan merupakan peran dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Dimana peran pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana berbentuk bantuan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Sialang Buah dapat disimpulkan

bahwasanya peran pemerintah belum optimal dan sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah daerah pernah beberapa kali memberikan bantuan berupa fasilitas alat penangkap ikan dan pembuatan TPI, tapi tetap saja pemberian bantuan hanya bersifat sebentar dan tidak merata diberikan kepada seluruh nelayan, Salah satu keluhan yang dirasakan oleh masyarakat adalah naiknya harga BBM sebagai bahan bakar bagi perahu atau sampan nelayan baru-baru ini. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah agar dapat melakukan tindakan sigap dalam membantu para nelayan dalam hal meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian ini, yaitu kepada masyarakat nelayan di Desa Sialang Buah yang bersedia menjadi informan dalam menyusun penelitian ini hingga selesai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin As, Z. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Anwar, Zakariya, & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia. *Sosioreligius*, 1(4), 52–60.
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Damima, J. (2022). Fungsi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Suatu Studi Kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *GOVERNANCE*, 2(1), 1–12.
- Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 1–8.
- Qodriyatun, S. N. (2013). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Aspirasi*, 4(2), 91–100. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/504>
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Rumarey Wattimena, Z. K., Rustadi, R., & Suadi, S. (2022). Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung Nelayan Di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 51. <https://doi.org/10.22146/jkn.72773>
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–255.
- Takariani, C. S. D. (2015). Opini Nelayan Tentang Akses Informasi Publik. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2), 101–114. <https://doi.org/10.20422/jpk.v18i2.40>
- Taufik. (2013). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 61–70.
- Ulfa, M. (2018). Persepsi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau

- dalam Aspek Sosial Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 23(1), 41–49.  
<https://doi.org/10.17977/um017v23i12018p041>
- Wijayanti, L., & Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Agriekonomika*, 2(2), 139–152.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/433>
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 2(3), 793–804.